

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TELUK LECAH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim**



Oleh :

WIRDA AFNI

NIM. 10975008241

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

PEKANBARU

2013

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA DI DESA TELUK LECAH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

OLEH: WIRDA AFNI

Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama: bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, yang kedua: apa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 88 orang. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran angket (Kuisisioner). Sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa hasil observasi, wawancara dan penyebaran angket (kuisisioner). Setelah dilakukan analisa maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa di desa teluk lecah kecamatan rupa tidak baik.

Berdasarkan observasi dan dari analisa data penulis melalui penyebaran angket dan wawancara maka dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis adalah, kurangnya anggaran yang didapatkan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Kata kunci: pelaksanaan pembangunan, faktor penghambat pembangunan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi refrensinya keterbatasan data maupun keterbatas pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan biimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan:

1. Kepada keluargaku tercinta: Ibu (Farida), Kakak (Elin,Rustina) dan Abang (Yudi, Suherman, Andis, Andika), abang ipar (Misran, Sudirman) Ponakan (Yanda, Dian DZ) terima kasih atas semangat, serta bantuan dana dan do'a yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat

waktu. Tidak lupa juga kepada ayah tersayang Nurdin(Alm) yang telah mendidik penulis dimasa hidupnya dengan baik.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Nazir, MA sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Kepada Bapak Afrizal, S.Sos, M.si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Kepada Bapak Alpizar M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi, sehingga penulis bisa menyusun karya ilmiah ini dengan lebih baik lagi.
6. Kepada Ibu Devi Deswimar, Selaku Dosen Konsultasi Proposal yang telah mengajari begitu banyak ilmu kepada penulis tentang pembuatan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen pada jurusan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada Aparatur Pemerintahan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Kepada teman penulis: Rusdianto dan Hafsah, terimakasih atas semangat dan motivasi serta bantuannya mendapatkan data dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman satu kost, ayu, ica, Herzafni Afiza, Rafidah, dan Purpo Sari.
11. Kepada Kawan-kawan ANA C angkatan 2009, terimakasih telah bersedia untuk menjadi teman seperjuangan penulis selama ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pihak, selain “Jazakumullah Kairan Katsiran” semoga Allah SWT memberikan balasan dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Rabb...

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, Maret 2013

Penulis,

WIRDA AFNI
10975008241

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Administrasi Pembangunan.....	12
2.1.1 Pembangunan Dalam Islam	15
2.1.2 Pembangunan Dibidang Pendidikan.....	17
2.1.3 Pembangunan Dibidang Kesehatan.....	18
2.1.4 Pembangunan Dibidang Pertanian	18
2.2 Otonomi Daerah	19
2.3 Otonomi Desa.....	22
2.4 Definisi Konsep	30
2.5 Konsep Operasional.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 waktu dan Tempat	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Populasi dan Sampel.....	36
3.4.1 Populasi.....	36
3.4.2 Sampel	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38

3.6 Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Teluk Lecah.....	40
4.2 Penduduk	41
4.3 Mata Pencarian	41
4.4 Agama.....	41
4.5 Gambaran Umum Kantor Desa Teluk Lecah	42
4.6 Kepala Desa.....	42
4.7 Sekretaris Desa	43
4.8 Kepala Urusan	43
4.9 Kepala Dusun	44
4.10 Ketua RW	44
4.11 Lembaga Pendayagunaan Masyarakat.....	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Responden.....	46
5.1.1 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
5.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
5.1.3 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	48
5.1.4 Responden Berdasarkan Umur	49
5.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis	50
5.2.1 Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Urusan Keamanan dan Pasar Desa	53
5.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa di Bidang Pertanian	60
5.2.3 Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Agama.....	68
5.2.4 Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kesehatan.....	74
5.2.5 Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pendidikan ...	79
5.3 Rekapitulasi Data	86
5.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis	88

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Otonomi daerah memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa

pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P.Siagian :2008).

Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang cukup berkembang dan memiliki tempat wisata yang sangat strategis, khususnya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert. Tetapi hal ini belum bisa dikelola oleh Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert ini disebabkan karena minimnya pembangunan yang bisa mempercepat lajunya perkembangan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert. Dilihat dari kondisi sekarang ini maka banyak yang harus dibenahi dalam proses pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di Desa Teluk Lecah, hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert itu sendiri.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya dan Kepala Desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah tertentu.

Sejak berlakunya UU No. 32./2004 dan UU 33/2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat,

yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di Kabupaten/Kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai masyarakat adat yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Taliziduhu Ndraha (kutipan nurcholis hanif 2011:21) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengambil keputusan membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga

2. Menjalankan pemerintahan desa
3. Memilih kepala desa
4. Memilih harta benda dari kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
7. Menyusun APPKD (anggaran pendapatan dan pengeluaran keuangan desa)
8. Menyelenggarakan gotong royong
9. Menyelenggarakan peradilan Desa
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya Otonomi Desa maka Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah NO. 4 Tahun 2008 tentang tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan larangan Pemerintahan Desa. Pada pasal 5 menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup dan melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan Kepala Desa.

Untuk menjalankan tugas dan kewajiban di atas Kepala Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mempunyai Fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa Teluk Lecah
6. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya

Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mempunyai tujuan program kerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan yang handal.
3. Meningkatkan pengelolaan dalam lingkungan yang sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Meningkatkan ekonomi masyarakat.
7. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
8. Pencatatan dan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa Teluk Lecah. Program kerja Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kabupaten Bengkalis dapat di lihat dari tabel pelaksanaan program kerja

Tabel 1.1: Program Kerja Desa Teluk Lecah Tahun 2012

No	Bidang Kegiatan	Target	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Persentase
1.	Urusan Pembangunan:				
	1. Jalan Desa	6500mx6 m	2000 m x 6m	4500 m x 6m	30.76%
	2. Jembatan Desa	6 Buah 10x12 m/buah	1 buah	5 buah	16,66%
	3. Pasar Desa	2 buah (50m/ buah)	1 buah	1 Buah	50%
	4. Masjid Desa	5 Buah (200 m/ buah)	2 buah	3 buah	40%
2.	Urusan Kesejahteraan rakyat:				
	1. Pustu	2 unit	1 unit	1 unit	50%
	2. Posyandu Desa	1 unit	1 unit	—	100%
	3. Gedung sekolah	14 buah: PAUD(3), TK(1), SD(4), SMP(1), SMA(1), DTA(4)	7 buah: TK(1), SD(2), SMP(1) SMA(1), DTA(2)	7buah: PAUD(3), SD(2), DTA(2)	50%
	4. Rumah layak huni	80 Unit	36	44	45%
	5. Ambulan laut	1 unit	—	1 unit	0%
	2	3	4	5	6

3.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban:				
	1. Siskamling	5 unit	3 unit	2 unit	60%
4.	Urusan Pemerintahan:				
	1. Gedung Pelatihan aparat pemerintah desa	1 unit	—	1 unit	0%
	2. Gedung BPD	1 unit	—	1 unit	0%
	3. Gedung LKMD	1 unit	—	1 unit	0%
	4. Lembaga Adat Melayu	1 unit	—	1 unit	0%
	5. Gedung serbaguna	1 unit	1 unit		100%

Sumber Data: *Kantor Desa Teluk Lecah 2012.*

Dari tabel diatas bisa terlihat bahwa masih banyak program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan, khususnya bisa dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksana secara optimal. Dalam menata sistem pemerintahan terendah di indonesia, termasuk salah satunya Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dari sistem sentralisasi kembali ke Otonomi Desa dengan tujuan untuk meletakkan kerangka

pemerintahan yang kuat dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat terendah.

Dalam peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 yang merupakan penguat atau penjelasan yang lebih dari Undang-undang No 32 Tahun 2004 dimana Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan Untuk meningkat kan taraf hidup dan kesejahteraan mayarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa program kerja Pelaksanaan Pembangunan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert belum maksimal di laksanakan.

Dan oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dalam Pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini adalah: “

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.**
- 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.**
- 2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan di Desa Teluk Lecah.

2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

1.5 Sistematika Penulisan.

BAB 1: PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat serta Sistematika Penulisan.

BAB 11: TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menyajikan beberapa teori atau definisi-definisi tentang Pembangunan, Otonomi daerah dan Otonomi Desa.

BAB 111: METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas waktu dan lokasi, jenis dan sumber data, teknik analisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan

penelitian, seperti lokasi penelitian, karakteristik, dan demokrasi.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi objek penelitian bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB 11

TELAAH PUSTAKA

2.1 Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut Nation-building (Sondang P. Siagian 4:2001) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Apabila definisi diatas dimaknai secara cermat, akan muncul dipermukaan paling sedikit tujuh ide pokok. *Pertama:* pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat indenpenden akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari suatu yang bersifat tanpa akhir (never ending). Banyak cara yang dibutuhkan dalam pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh. *Kedua:* pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan

sebagai suatu yang akan dilaksanakan. *Ketiga* pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa mendatang. *Keempat* rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu kejangka waktu yang lain. *Kelima* pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antarlain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara fikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. *Keenam* modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketujuh* semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

Dalam proses pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dari masing-masing negara tersebut, banyak diantaranya negara-negara yang sedang berkembang tersebut berhasil merealisasikan tujuan nasionalnya. Akan tetapi banyak pula yang mengalami kegoncangan-kegoncangan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Menurut syamsi (yuswar zainul basri & mulyadi subri, 2003:15) Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya.

Untuk menilai seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dianggap berhasil, harus didasarkan seberapa jauh kebijaksanaan pemerintah itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakannya. Setiap kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pemerataan pendapatan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang P.Siagian (2008) pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali

masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dan pasar. Adapun pembangunan yang dampaknya tidak langsung misalnya pembangunan TK dan SD. Pembangunan TK dan SD memang tidak secara langsung terlihat membawa peningkatan kesejahteraan warga desa karena dampaknya akan terlihat setelah murid tersebut dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari pada anak desa yang tidak terdidik. (Samudra Wibawa, 2009:7)

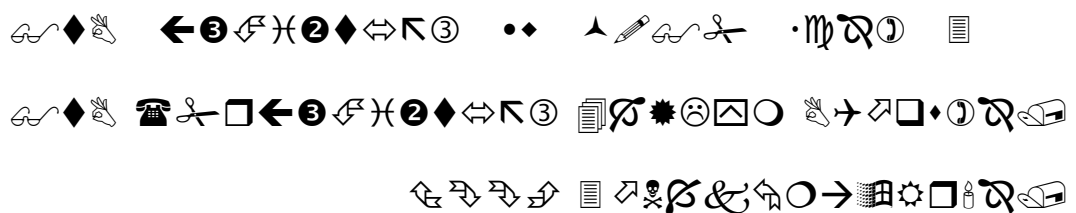
2.1.1 Pembangunan dalam islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan.

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

Nabi Muhammad saw. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan : “Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam Alquran pada potongan Q.S Ar-Ra'd :11) sebagai berikut:



Artinya”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (bangsa) sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (potongan Q.S Ar-Ra'd :11).

Dari ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka

lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

2.1.2 Pembangunan dibidang pendidikan

Adapun tujuan dari pembangunan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikir masyarakat. Program pembangunan pendidikan ini merupakan respons atau tuntutan masyarakat yang berkembang dinamis, yang menghendaki adanya perbaikan dibidang pendidikan. Program pembangunan pendidikan telah disusun, terdiri dari:

1. Program peningkatan pemerataan pendidikan (Dasar, Menengah, dan Tinggi)

Peningkatan pemerataan dilakukan melalui:

- a. Memperluas jangkauan pada jenjang sekolah dasar, menengah dan tinggi sehingga masyarakat mudah mengakses sekolah.
- b. Meningkatkan daya tampung, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah padat penduduk.

2. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui:

- a. Peningkatan kualitas tenaga guru.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Penyempurnaan kurikulum.

3. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2.1.3 Pembangunan dibidang kesehatan

Visi pembangunan kesehatan kedepan adalah “indonesia sehat”. Untuk mewujudkan visi kesehatan tersebut, maka misi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya.

2.1.4 Pembangunan Dibidang Pertanian.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal diperdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja (Mudrajad Kuncoro:289)

Ungkapan ini tidak jauh berbeda dengan banyak teori tentang peranan sektor pertanian dalam proses pembangunan ekonomi misalnya Menurut heady dkk (Mudrajad Kuncoro:289), para ahli pembangunan menganjurkan pentingnya alokasi sumber daya secara efisien untuk menjaga adanya pertumbuhan output dalam jangka panjang. Dengan arah ini pemikir ekonomi pembangunan lebih

menutamakan tercapainya pertumbuhan pendapatan dengan memberdayakan faktor produksi yang produktifitas tinggi.

2.2 Otonomi Daerah

Haw Widjaja (2005:07) otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan dari otonomi Daerah adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini ialah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.

Dengan demikian, dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi administratif pemerintahan daerah, tetapi berlaku pula pada masyarakat atau publik, dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta yang bersangkutan.

Desentralisasi telah lama dianut dalam negara Indonesia. Secara historis, asas desentralisasi itu telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan adanya undang-undang desentralisasi tahun 1903. Secara empiris, asas tersebut selalu diselenggarakan bersama asas sentralisasi. Kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomi merupakan kontinum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini terjadi kecenderungan ke arah sentralisasi. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha agar terjadi tendensi ke arah desentralisasi.

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.

Dari sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah, dimana setiap daerah berhak mengatur sistem pemerintahannya sendiri dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dengan adanya Otonomi Daerah maka setiap pemerintahan yang ada di daerah juga mengalami perubahan termasuk juga Desa.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menawarkan berbagai macam paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. Paradigma yang ditawarkan antara lain.

- a. Kedaulatan rakyat
- b. Demokrasi
- c. Pemberdayaan Masyarakat

d. Pemerataan dan Keadilan.

Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, dapat memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa. Dasar pemikiran dari Otonomi Daerah adalah bahwa Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas Desentralisasi didalam penyelenggaraan pemerintah yakni dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya, azas ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah besar dan kecil yang bentuk dan susunannya ditetapkan oleh Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara serta hak asal usul didalam daerah yang bersifat istimewa. (Haw. Widjaja, 2003:1)

Sebagai wujud penghormatan hak asal usul identitas kedaerahan, maka dikeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah. kebijakan tersebut memberi kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kebijakan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan, kebijakan otonomi memberikan kewenangan mengatur prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang

pada masyarakat tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Pencanangan Otonomi Daerah, Dilaksanakan pula pelaksanaan Otonomi Desa untuk setiap wilayah kabupaten.

2.3 Otonomi Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widjaja, 2005:148).

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai

dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tatacara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau menerima keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, dan lain-lain sebagaimana dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Implementasi kewenangan Desa di tinjau dari perspektif implementasi sebagai interaksi (*implementation as interaction*), sesungguhnya bukanlah sebuah proses yang berjalan linier, melainkan sebuah siklus yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Namun yang terjadi pola interaksi semi *reciprocal* mendominasi hubungan antara Pemdes dengan berbagai *policy stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kewenangan desa. Semi *reciprocal interaction* terjadi antara Pemdes

dengan BPD. Hal ini terjadi karena BPD belum memahami job discription sesungguhnya.

Otonomi Desa adalah otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan atas hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman (Haw Widjaja).

Pelaksanaan Otonomi Desa berikut dengan pengakuan segala hak Otonomi yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk langkah serius dalam memenuhi amanah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 12, sebagai revisi atas Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pengembangan Otonomi Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari

penataan Desa, tata kehidupan masyarakat dan potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan adat istiadat masyarakatnya.

Oleh karena itu, dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumberdaya manusia potensial yang ada didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, karang taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

Menurut Haw Widjaja (2002:88) desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagaimana sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

“Mengatur” diatas mengandung arti bahwa kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur, sedangkan “ mengurus” artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengurus dan mengatur kepentingannya sendiri berarti kesatuan

masyarakat hukum tersebut memiliki mempunyai otonomi. Hanya saja otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi atau kabupaten kota, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah terjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan (Hanif Nurcholis,2011:64)

Menurut Undang-Undang NO 32 Tahun 2004 pasal 28 disebutkan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Perda, berdasarkan peraturan pemerintah. Kewenangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
2. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
3. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada Desa
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan peundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan Nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan Desa, baik dalam bidang pelayanan, pengaturan maupun pemberdayaan masyarakat. Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut, Clive Day (Hanif Nurcholis) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa diatasnya.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Dengan PP No.38 2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota sangat jelas dan rinci. Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa diantara nya adalah Otonomi Desa.

Soetardjo (Hanif Nurcholis, 2001:21) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri

berdasarkan hukum adat. Soetardjo telah menguraikan bentuk dan isi otonomi desa sebagai berikut:

1. Di bidang lapangan pertanian,

Desa memikul tanggungjawab atas tersedianya pangan bagi warganya, menyediakan semua yang menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan pendapatan petani, mengatur tanah komunal, menetapkan hak dan kewajiban kepada warganya yang mendapat giliran memakai tanah komunal tersebut, memelihara tanah pangonan, memelihara dan mengatur sistem pengairan, serta memelihara pelabuhan air.

2. Di bidang keagamaan.

Desa berkewajiban menjaga keharmonisan antar warganya untuk itu perlu ada tugas khusus yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan atau kerohanian di desa.

3. Di bidang kesehatan rakyat.

Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan warganya, menjaga kebersihan kandang hewan, selokan-selokan dan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

4. Di bidang pengajaran/pendidikan.

Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usia sekolah dan menyuruh orangtuanya memasukan anaknya kesekolah desa atau sekolah rakyat. Mengontrol anak-anak usia sekolah ini agar tetap masuk sekolah. Anak-anak

kedapatan tidak masuk sekolah akan dicari dan dibujuk untuk masuk sekolah. pemerintahan desa bertanggungjawab terhadap pemeliharaan gedung sekolah, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, kesejahteraan guru dan penjaga, dan keamanan sekolah.

5. Di bidang pasar desa dan keamanan masyarakat

Desa punya hak untuk menyelenggarakan pasar desa. Pasar desa dikelola oleh desa sendiri. Dan desa secara otonom berhak mengatur sistem keamanan desa secara menyeluruh.

6. Hak atas tanah

Desa mempunyai dua hak atas tanah :

- a. Hak yayasan yaitu hak yang diberikan kepada seorang warganya untuk dimiliki secara perorangan
- b. Hak komunal yaitu hak desa untuk memiliki tanah desa secara tetap.

Warga yang menerima hak ini hanya mempunyai hak menggarap.

7. Di bidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti atau gotong royong.

Pemerintah desa mempunyai hak untuk mengerahkan warganya bekerja bakti untuk kepentingan desa.

8. Di bidang sinoman, bido, atau arisan.

Sinoman, bido, arisan adalah suatu perkumpulan warga desa yang bertujuan menyelesaikan pekerjaan salah satu anggotanya secara bersama.

9. Di bidang pengadilan desa

Pengadilan desa adalah lembaga hukum asli yang dimiliki oleh hampir semua desa di Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yaitu terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh Sekretaris Desa.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan.
 - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa diwilayah kerjanya seperti kepala Dusun

2.4 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

2. Otonomi Desa adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
4. Pembangunan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikir masyarakat.
5. Pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya.
6. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja (Mudrajat Kuncoro:289)
7. Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan

pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

8. Pembangunan bidang kenyamanan dan pasar desa adalah suatu usaha yang dilakukan oleh desa dengan kewenangan otonomi desa yang dimiliki untuk mewujudkan ketentraman dalam masyarakat serta menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui penyelenggaraan pasar desa dan untuk menggerakkan perekonomian desa.

2.5 Konsep operasional

Konsep Operasional	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat	1. Pembangunan di bidang pasar desa dan keamanan masyarakat.	1. Membuat Siskamling 2. Penjagaan siskamling 3. Menyelenggara rakan pasar desa	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang baik d. Tidak Baik
	2. Pembangunan dibidang pertanian	1. Pembinaan terhadap petani 2. Penyediaan bibit unggul 3. Subsidi pupuk	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang baik d. Tidak Baik
	3. Pembangunan dibidang keagamaan	1. Mauludan 2. Tahlilan 3. Penyantunan anak yatim	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang baik d. Tidak Baik
	4. Pembangunan di bidang kesehatan rakyat.	1. Penyediaan posyandu 2. Penyediaan pustu	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang baik d. Tidak Baik
	5. Pembangunan dibidang pendidikan	1. Mendata anak usia sekolah 2. Membangun dan Memelihara gedung sekolah 3. Menjaga keamanan sekolah	a. Baik b. Cukup Baik c. Kurang baik d. Tidak Baik

Yang menjadi tolok ukur atau Indikator dalam penelitian ini diambil dari teori Soetardjo. Yang mana menurut Soetardjo ada 9 macam bentuk dan isi dari otonomi Desa. Yaitu terdiri dari:

1. Otonomi dilapangan pertanian
2. Otonomi dibidang keagamaan
3. Otonomi dibidang kesehatan rakyat
4. Otonomi dibidang pengajaran/pendidikan
5. Otonomi dibidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat
6. Otonomi hak atas tanah
7. Otonomi dibidang gugur gunung, kerja wajib, kerja bakti atau gotong royong
8. Otonomi dibidang sinoman, bido atau arisan
9. Otonomi dibidang pengadilan desa

Dan dari sembilan macam bentuk dan isi dari Otonomi Desa menurut Soetardjo ini, penulis mengambil 5 *point* yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam penelitian ini, karena 5 *point* tersebut sudah bisa menjawab permasalahan yang ada didesa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan indikator variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian, dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis indikator variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variable-variabel yang ada dalam penelitian ini.

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilakukan selama lebih kurang 3 bulan, yaitu dari bulan November 2012 sampai Januari Tahun 2013.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden penelitian lapangan mencakup : data hasil tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert yang didapatkan melalui angket maupun wawancara.
2. Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini meliputi: Peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan otonomi Desa Bagi Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert, Kebijakan atau program-program yang telah dijalankan berhubungan dengan otonomi yang dimiliki Desa.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Lecah sebanyak 756 KK dan penulis jadikan sebagai *key informan* atau informasi kunci sebanyak 5 orang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2007). Untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *rumus slovin*. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa per-KK, dimana diambil satu orang

mewakili satu KK. Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert yang berjumlah 756 KK, yang kemudian dijadikan jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (Dalam Husein Umar, 2004) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{756}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{756}{1 + 756(10\%)}$$

$$n = \frac{756}{1 + 756(0,01)}$$

$$n = \frac{756}{8.56}$$

$$n = 88.317$$

$$n = 88$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 756 orang dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapatkan sampel sebanyak 88,317 yang dibulatkan menjadi 88 orang.

Dari jumlah sampel ini, maka penulis jadikan sebagai *Key Informan* adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni diambil berdasarkan

prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. *Key Informan* yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan 2 orang dari Tokoh Masyarakat.

Oleh karena pengambilan sampel yang penulis jadikan sebagai *key informan* adalah sebanyak 5 orang, maka sisa dari jumlah sampel tersebut peneliti hanya akan menyebarkan angket yaitu sebanyak 83 kepada masyarakat desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis yang dilengkapi dengan berbagai alternatif jawaban.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti :

3.5.1 Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan langsung pada objek yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang akan mendukung dalam penelitian.

3.5.2 Kuesioner atau Angket

Yaitu mengajukan pertanyaan tertulis yang dilengkapi dengan alternatif jawaban dalam bentuk pertanyaan tertutup.

3.5.3 Wawancara

Yaitu langsung meneliti dengan menemui responden, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peneliti.

Wawancara dilakukan untuk mendalami suatu permasalahan yang menurut peneliti perlu penjelasan lebih lanjut.

3.6 Analisa Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert, kemudian data dituangkan kedalam bentuk tabel-tabel dengan angka dan prosentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa.

Adapun menurut Arikunto (2006:79). Dalam menganalisa data penelitian penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif atau disebut juga analisis isi (*Content analysis*), menurut Suryabrata (dalam Muslim, Jurnal El-Riyasah Volume 2. 2011) penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Analisa deskriptif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Adapun persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Besar persentase alternatif jawaban

F: Frekuensi alternatif jawaban

N: Jumlah sampel penelitian (Sudjono,2003:40)

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Dan Keadaan Geografis Desa Teluk Lecah

Desa Teluk Lecah merupakan salah satu dari 12 desa diwilayah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, yang terletak 40 Km ke arah selatan dari kota kecamatan. Desa teluk lecah mempunyai luas wilayah seluas 8600 hektar. Sebelum nya nama Desa ini yaitu desa bakau secanel (bakau tanda kuala). Karena memang pada dahulu kala banyak sekali pohon bakau di pantai desa ini, tetapi lama kelamaan pohon bakau ini punah karena terjadinya erosi secara meluas Dan kemudian lahan-lahan ini menjadi lecah dan beting bakau secanel runtuh pantainya menjadi teluk sehingga penduduk desa menggelar nama desa ini menjadi desa Teluk Lecah.

Dengan kebijakan ketua kampung pada zaman itu dan masyarakat desa teluk lecah kecamatan rupat, mereka bergotongroyong membuat jalan baru yang sampai sekarang masih dipakai oleh cucu cicit mereka.

Adapun batas-batas wilayah yang Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa sungai cingam
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parit Kebumen
3. Sebelah timur berbatasan dengan laut selat melaka.
4. Dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarjo Mesim

4.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tahun 2012 terdiri dari 756 KK yang terdiri dari 3121 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1138 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1983 jiwa.

4.3 Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian desa ini pada umumnya adalah karet dan sawit. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup petani-petani didesa ini juga mempunyai mata pencaharian lainnya seperti berdagang, tukang buruh, dan nelayan. Dan ada sebagian masyarakat yang sudah bekerja sebagai PNS.

Untuk jelasnya bisa dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1: Mata Pencaharian Desa Teluk Lecah:

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
60%	25%	10%	5%

Sumber data: Kantor Desa Teluk Lecah

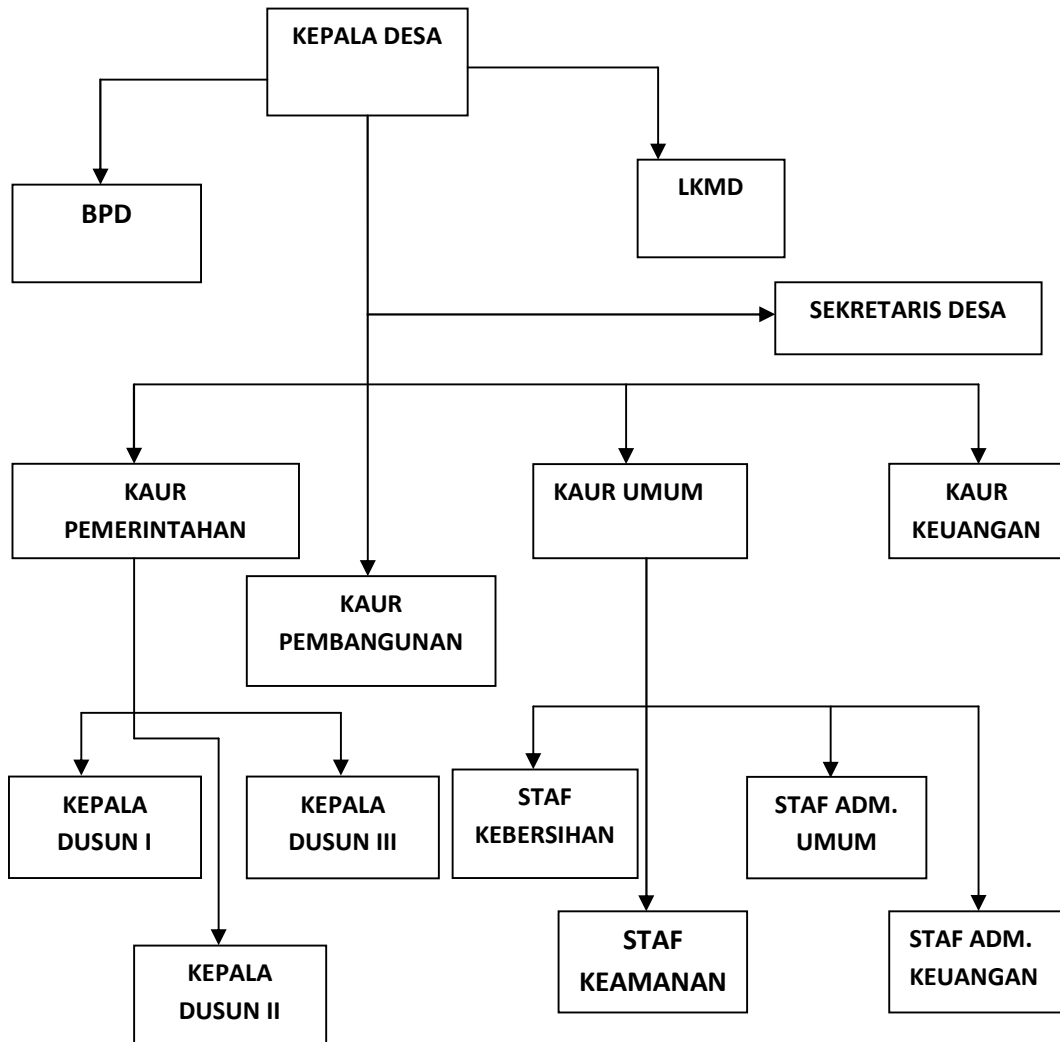
Dari tabel ini maka dapat terlihat bahwa mata pencaharian petani sebanyak 60%, pedagang 25%, PNS 10% dan Buruh 5%. Ini dapat diartikan bahwa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian bertani.

4.4 Agama

Pada umumnya penduduk Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memeluk Agama Islam, sesuai dengan adat melayu sopan santun dan ramah tamah. Mayoritas penduduk desa adalah dari suku melayu di desa ini tidak ada satu masyarakat pun yang beragama selain islam.

4.5 Gambaran Umum Kantor Desa Teluk Lecah

1. Struktur Organisasi Desa



4.6 Kepala Desa

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa, merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menumbuhkembangkan jiwa kebersamaan dan gotong royong dalam sendi utama dalam pemerintahan desa.

4.7 Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Untuk menjalankan tugas tersebut maka Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
2. Melaksanakan urusan keuangan desa
3. Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas.

4.8 Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan, keuangan dan umum sesuai dengan tugas bisangnya masing-masing.
2. Melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya dalam membantu sekretaris desa.

4.9 Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugas kepala dusun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya
2. Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh desa
3. Melaksanakan kebijakan Kepala Desa.

4.10 Ketua RW

Tugas ketua RW adalah perpanjangan tangan Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk pemerintah menjalankan pemerintahan desa yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

4.11 Lembaga Pendayagunaan Masyarakat

(LPM) adalah lembaga masyarakat didesa atau kelurahan yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan merupakan wahana partisipasi

masyarakat dalam membangun yang akan memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan Nasional. Yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penelitian ini penulis menyebarkan angket sebanyak 83 angket yang disertai dengan berbagai alternatif jawaban, yang kemudian jawaban dari responden dikuatkan lagi dengan cara mewawancarai beberapa orang dari sampel penelitian. Pengetahuan masyarakat mengenai Otonomi Desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi Desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional.

5.1 Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Pelaksanaan pembangunan Desa dalam kerangka otonomi Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat. Adapun karakteristik responden pada penelitian ini didasarkan pada tingkat pendidikan, jenis kelamin, jenis penelitian dan menurut umur. Maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

5.1.1 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebagai dasar pertimbangan untuk mempedomani segala sesuatu yang menyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberikan responden pada masalah variabel penelitian maka penulis terlebih dahulu melihat dari segi latar belakang tingkat pendidikan responden. Dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel V.I: Responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	Sekolah Dasar	12	14,4 %
2	SLTP	19	22,9 %
3	SMU	27	32,6 %
4	Perguruan Tinggi	25	20,1 %
Jumlah		83	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2012

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pendidikan formal responden sebanyak 12 orang atau 14,5 % berpendidikan SD, 19 orang atau 22,9 % berpendidikan SLTP, 27 atau 32,6 % berpendidikan SMU, dan 25 orang atau 20,1 % lulusan perguruan tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik, juga dapat diartikan bahwa masyarakat Desa sebagian besar sudah menyadari pentingnya akan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Salah satu faktor pendorong baiknya pendidikan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sudah terbangunnya sekolah-sekolah yang bisa dijangkau oleh masyarakat dari sekolah TK sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian juga disebabkan oleh adanya keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

5.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2: Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	48	57,8 %
2	Perempuan	35	42,2 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden laki-laki 48 orang atau 57.8 % dan responden perempuan berjumlah 35 orang atau 42.2 %. Responden paling tinggi adalah laki-laki yaitu dengan persentase 57.8 %. Dapat disimpulkan bahwa, jumlah populasi yang penulis ambil dalam penelitian ini paling banyak adalah dari jenis kelamin laki-laki.

5.1.3: Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk melihat distribusi penelitian ini berdasarkan jenis pekerjaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3: Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Responden	Persentase%
1	Tani	40	48,2 %
2	Pedagang	19	22,9 %
3	PNS	20	24,1 %
4	Buruh	4	4,8 %
Jumlah		88	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang paling banyak adalah tani yaitu 40 orang atau 48,2 %. Hal ini bisa disebabkan karena sebagian besar masyarakat Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert adalah petani, adapun penghasilan petani yang paling besar di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis adalah bertani karet.

Sebenarnya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis bukan hanya berpenghasilan karet saja tetapi juga sawit, Namun, tidak terlalu banyak masyarakat yang memiliki kebun sawit. Kebun sawit hanya sebagai mata pencaharian kedua setelah karet.

5.1.4: Responden Berdasarkan Umur

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, usia akan memberikan pengaruh, semakin tinggi tingkat usia semakin baik karena tingkat kematangan emosi seseorang dalam berfikir. Selanjutnya tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang melakukan setiap aktifitas dalam kehidupannya. Karena itu tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Faktor usia juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Dari penelitian dapat dikatakan bahwa sebagian responden dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir, sehingga diharapkan mampu memberikan data-data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tingkat usia responden dapat dilihat dalam tabel 5.4 di bawah ini :

Tabel V.4: Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat umur	Responden	Persentase (%)
1	17-25 tahun	16	19,3 %
2	26-35 tahun	17	20,5 %
3	36-45 tahun	24	28,9 %
4	46-55 tahun	20	24,1 %
5	56-70 tahun	6	7,2 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: hasil penelitian lapangan 2012

Dari tabel V.4 di atas bahwa dari 83 orang responden terdapat 16 orang atau 19,3 % yang berumur 17-25 tahun, kelompok umur 26-35 tahun sebanyak 17 orang atau 20,5 %, umur 36-45 tahun 24 orang atau 28,9 %, dan yang berumur 46-55 tahun sebanyak 20 orang atau 24,1 %, dan yang terakhir 56-70 adalah sebanyak 6 orang atau 7,2 %.

Ini artinya bahwa responden berdasarkan tingkat umur yang penulis ambil dalam penelitian ini sudah mampu menjawab pertanyaan dari penulis dengan baik. Karena responden berdasarkan tingkat umur yang penulis ambil berada pada tingkat umur yang cukup berpengalaman tentunya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang Desa ini dan pastinya akan memberikan jawaban yang sangat baik.

5.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan kata lainnya dan Kepala Desa melalui

Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah tertentu.

Sejak berlakunya UU No. 32./2004 dan UU 33/2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selain otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Seiring berjalannya kebijakan otonomi desa cukup banyak menaruh harapan terutama yang mempunyai kepedulian terhadap upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga otonomi desa menjadi isu sentral kalangan

masyarakat beberapa tahun belakangan ini, karena dengan adanya gagasan otonomi desa dapat memperbaiki segala kerusakan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang nilai-nilai budayanya.

Kebijakan revitalisasi pemerintahan Desa berikut dengan pengakuan segala hak otonominya diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi upaya perbaikan Desa dalam mewujudkan berbagai pembangunan di Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan telah berjalan. Yang menjadi perhatian utama penulis dalam melakukan penelitian adalah pada lima bidang dalam mewujudkan otonomi lokal, yang juga dijadikan sebagai indikator di dalam penelitian ini, yaitu otonomi dibidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat, otonomi dibidang pertanian, otonomi dibidang keagamaan, otonomi dibidang kesehatan, serta otonomi dibidang pendidikan.

5.2.1 Pelaksanaan Pembangunan Desa Dibidang Keamanan Dan Pasar Desa

Pada bidang kenyamanan dan pasar desa penulis akan melihat sejauh mana penyelenggaraan pasar desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dan pengaturan sistem keamanan dalam masyarakat. Selanjutnya juga dilihat dari keseluruhan hak-hak otonomi yang dimiliki oleh desa tersebut, berapa banyak telah dilaksanakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

5.2.1.1 Membuat Siskamling

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa yang bersumber dari Otonomi Desa, Desa memiliki hak untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah mengenai kenyamanan dan ketentraman masyarakat desa, melalui keberadaan siskamling diharapkan mampu menciptakan keamanan di desa. Dalam menganalisis pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa digunakan data yang diperoleh dari responden yang penulis dapatkan melalui penyebaran angket.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian pembuatan siskamling telah mampu menciptakan keamanan bagi masyarakat desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5: Jawaban Responden Mengenai Pembuatan Siskamling

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	26	30,3 %.
2	Cukup baik	18	21,7 %
3	Kurang baik	19	22,9 %
4	Tidak baik	20	24,1 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian pembuatan siskamling telah mampu menciptakan keamanan bagi masyarakat desa, dimana yang menjawab “baik” sebanyak 26 orang atau 30,3 %, yang menjawab “cukup baik” sebanyak 18 orang atau 21,7 %, dan yang menjawab “kurang baik” sebanyak 19 orang atau 22,9 %, sedangkan yang menjawab “tidak baik” berjumlah 20 orang atau 24,1 %.

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa pembangunan siskamling yang ada di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah baik, karena bisa dilihat dari jawaban responden di atas yang menjawab baik yaitu sebanyak 26 orang atau 30,3 %. Itu artinya bahwa desa ini sudah mengusahakan dalam upaya penjagaan kenyamanan di dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian di lapangan siskamling yang ada di Desa yaitu sebanyak 5 buah siskamling.

5.2.1.2 Penjagaan Siskamling

Dengan keberadaan siskamling di Desa Teluk Lecah ada harapan akan mampu menciptakan ketentraman dalam kehidupan bagi masyarakat. Namun demi terwujudnya ketentraman tersebut tidak cukup hanya dengan memiliki

siskamling saja, artinya perlu tindakan yang berkelanjutan yaitu dengan penjagaan siskamling yang kontinue.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penjagaan siskamling telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.6: Jawaban Responden Mengenai Penjagaan Siskamling

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	3	3,6 %
2	Cukup baik	18	21,7 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	41	49,4 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai penjagaan siskamling dalam rangka memberikan penjagaan langsung di dalam masyarakat untuk dapat mewujudkan rasa kenyamanan dalam masyarakat, dimana yang menjawab “baik” sebanyak 3 orang atau 3,6 %, yang menjawab “cukup baik” sebanyak 18 orang atau 21,7 %, dan yang menjawab “kurang baik” sebanyak 21 orang atau 25,3 %, sedangkan yang menjawab “tidak baik” berjumlah 41 orang atau 49,4 %.

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa penjagaan siskamling yang ada di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak baik, karena bisa dilihat dari jawaban responden di atas yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 41 orang atau 49,4 %. Itu artinya bahwa desa ini belum bisa dikatakan

sebagai desa yang bisa memberi kenyamanan hidup kepada masyarakat meskipun pembangunan siskamling sudah berjalan namun jika penjagaannya belum dilaksanakan, maka tidak menjamin terciptanya kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat penelitian, untuk penjagaan siskamling memang belum ada dilaksanakan, sehingga keamanan dimasyarakat tidak begitu terjaga, buktinya hingga saat ini masih banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi dikalangan masyarakat seperti seringnya terjadi pencurian karet yang telah terkumpul oleh milik petani maupun milik pembeli karet dengan jumlah yang banyak begitu juga dengan sawit, selalu terjadi kehilangan sawit bahkan terkadang sawit hilang diatas pohon, mereka sendiri yang memanennya, dan ada juga yang pernah kehilangan motor.

Analisa ini didukung oleh pendapat salah seorang Tokoh Masyarakat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat yaitu Bapak Hasan Ahmad, Dapat dilihat pada kutipan langsung wawancara penulis dengan Bapak Hasan pada tanggal 27 Desember 2012,

beliau mengatakan :

“Keberadaan pos siskamling ini memang sudah lama ada di Desa Teluk Lecah ini, tapi sampai sekarang ini kalau untuk penjagaan memang belum ada dilaksanakan oleh masyarakat desa. Ini karena memang tidak ada penegasan langsung dari aparat pemerintah desa untuk menjaganya atau mengadakan rapat membuat kebijakan tentang tentang hal itu. jadi dari masyarakat desa sendiri tentu merasa terbuang waktunya untuk menjaga siskamling tersebut. Jadi tidak heran lagi kalau memang masih banyak terjadi tindakan yang melanggar asusila yang terjadi dimasyarakat. Seperti pencurian dan lain sebagainya.

5.2.1.3 Menyelenggarakan Pasar Desa

Keberadaan pasar desa tentunya sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat selain dijadikan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar juga bisa berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa karena keberadaan desa bisa dijadikan sebagai ladang mata pencarian masyarakat desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan pasar desa telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.7: Jawaban Responden Mengenai Penyelenggaraan Pasar Desa

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	10,9 %
2	Cukup baik	24	28,9 %
3	Kurang baik	22	26,5 %
4	Tidak baik	28	33,7 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai penyelenggaraan pasar desa, yang menjawab “baik” sebanyak 9 orang atau 10,9%, yang menjawab “cukup baik” sebanyak 24 oarang atau 28,9 %, dan yang menjawab “kurang baik” sebanyak 22 orang atau 26,5 %, sedangkan yang menjawab “tidak baik” berjumlah 28 orang atau 33,7 %.

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat, jawaban untuk penyelenggaraan pasar desa di desa teluk lecah tidak baik. Karena jawaban yang paling tinggi itu berada pada jawaban tidak baik dengan jumlah persentase 33,7 %.

Pasar desa Teluk Lecah yang ada cuma satu yang beroperasi hanya satu kali dalam satu minggu dan itu pun terkadang penjualnya tidak selalu datang. Sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk perlengkapan dapur Masyarakat hanya bisa membeli di kedai-kedai eceran.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang Pegawai Kantor Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat yaitu Dengan Bapak Khaidir selaku sekretaris desa pada tanggal 12 Desember 2012, dari Bapak khaidir selaku sekretaris desa.

“ Salah satu penghambat tidak terealisasinya penyelenggaraan pasar desa di desa ini adalah kurang adanya partisipasi masyarakat dalam desa ini sendiri dalam hal menjaga keamanan dalam proses jual beli. Karena pada mulanya desa ini sudah mulai mau menyelenggarakan pasar desa namun karena ada sebagian masyarakat yang panjang tangannya maka penyelenggaraan pasar ini terhambat. Pedagang mulai merasa risih dengan kejadian seperti ini. Sehingga para penjual tidak mau lagi berdagang di desa ini karena memang pedagang ini tidak semuanya berasal dari masyarakat desa ini sendiri.

Hal ini perlu ditingkatkan kemauan dari pemerintahan desa dalam mengupayakan terselenggaranya pasar desa di desa ini, apa sebaiknya tindakan tegas yang perlu dilakukan kepada masyarakat demi terselenggaranya pasar desa agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berbelanja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel V.8: Rekapitulasi jawaban responden di bidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	Jumlah (%)
1	Membuat siskamling	26	18	19	20	83(100%)
2	Penjagaan siskamling	3	18	21	41	83(100%)
3	Menyelenggarakan pasar desa	9	24	22	28	83(100%)
Jumlah		38	60	62	89	249(100%)
Rata-rata		12,7	20	20,6	29,7	83(100%)
Persentase Rata-rata		15,3 %	24,1%	24,9 %	35,7 %	100 %

Sumber data: *hasil penelitian lapangan 2012*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dari tiga sub indikator yang diteliti mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 38 orang, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 60 orang, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 62 orang, dan tidak baik jumlahnya 89 orang.

Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa ini adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden kemudian dibagi jumlah sub indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 12,7 dengan persentase 15,3 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 20 dengan persentase 24,1 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 20,6 dengan persentase 24,9 %. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 29,7 dengan persentase 35,7 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada bidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat desa adalah Tidak Baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 29,7 atau 35,7 % dari jumlah responden. Ini artinya pembangunan pasar desa dan kenyamanan masyarakat di Desa ini kurang diperhatikan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat desa itu sendiri.

5.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa Dibidang Pertanian

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal diperdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja (Mudrajad Kuncoro:289)

Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat sebagian besar masyarakat penghasilannya adalah bertani. Desa bertanggungjawab atas tersedianya pangan bagi warganya, Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para petani khususnya.

Di dalam bidang ini penulis akan menfokuskan pada tiga bagian penting yaitu pembinaan terhadap petani, penyediaan bibit unggul dan subsidi pupuk. Analisis data yang dibuat berdasarkan jawaban dari responden yang didapatkan

melalui angket. Berikut ini adalah jawaban responden mengenai pelaksanaan pembangunan dalam kerangka otonomi desa dibidang pertanian.

5.2.2.1 Pembinaan Terhadap Petani

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Untuk mewujudkan itu semua memerlukan petani-petani yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam bidangnya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan pembinaan terhadap petani-petani khususnya yang berada di Desa Teluk Lecah. Pembinaan disini bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani-petani.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian memberikan pembinaan terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas setiap petani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.9: Jawaban Responden Mengenai Pembinaan Terhadap Petani

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	15	18 %
2	Cukup baik	20	24,1 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	27	32,6 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian

memberikan pembinaan terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan kualitas setiap petani, dimana yang menjawab baik sebanyak 15 orang atau 18 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 20 orang yaitu 24,1 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 21 orang atau 25,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32,6 %.

Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap para petani di desa ini belum baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu berjumlah lebih besar yaitu dengan persentase 32,6 %.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat yaitu dengan Bapak Hasan Ahmad pada tanggal 13 desember 2012, dari Bapak Hasan Ahmad penulis mendapatkan jawaban mengapa kebanyakan para petani dalam bertani kurang begitu mendapatkan hasil panen yang optimal. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Hasan Ahmad :

“Para petani di Desa Teluk Lecah ini memang kurang mendapatkan hasil panen yang baik. Karena kebanyakan petani disini dalam bertani hanya mengandalkan kemauan saja, mereka kurang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dalam bidang petanian. Memang dari pemerintahan desa ini sendiri tidak pernah mengadakan yang namanya pembinaan terhadap para petani”.

5.2.2.2 Penyediaan Bibit Unggul

Agar terwujudnya pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, serta memperluas kesempatan kerja. Tidak

cukup hanya dengan memberikan pembinaan terhadap petani. Kondisinya hari adalah para petani selalu kesulitan untuk memperoleh bibit-bibit unggul ketika akan bercocok tanam dikarenakan keterbatasan kemampuan secara finansial. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan bibit unggul terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.10: Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Bibit Unggul

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	16	19,2 %
2	Cukup baik	17	20,5 %
3	Kurang baik	23	27,7%
4	Tidak baik	27	32,6 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan bibit unggul terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah, dimana yang menjawab baik sebanyak 16 orang atau 19,2 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 17 orang yaitu 20,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 23 orang atau 27,7 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32,6 %.

Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan bibit unggul belum berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang lebih besar yaitu dengan persentase 32,6 %.

Pada tahun 2011 di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pernah menyediakan bibit unggul padi yang dibagikan kepada masyarakat 10 kg Per/KK. Kemudian masyarakat juga pernah mendapatkan bibit karet dari PEMDA pada tahun 2010 yang mana bibit ini dikeluarkan oleh PEMDA berdasarkan pengajuan proposal yang dibuat oleh masyarakat secara berkelompok sesuai dengan kedekatan tanah yang mereka miliki untuk mengisi lahan yang telah tersedia. Bagi masyarakat yang tidak membuat proposal maka mereka tidak mendapatkan bibit unggul tersebut.

Untuk lebih jelasnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Teluk Lecah melalui pengambilan data dengan bertemu langsung penulis dengannya pada tanggal 27 Desember. Beliau mengatakan bahwa faktor penghambat tidak terealisasinya pembangunan dibidang ini yaitu:

“dalam penyediaan bibit unggul, pemerintahan desa tidak bisa memberikan sesuai dengan keinginan masyarakat ini dikarenakan kurangnya dana yang didapatkan dari pemerintahan daerah selaku badan yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, tanpa adanya dana maka desa ini tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk memberikan bibit sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak mungkin aparat desa mengeluarkan dana sendiri sebanyak itu, sementara penduduk kita sebagian besar adalah petani”

5.2.2.3 Subsidi Pupuk

Keterbatasan kemampuan secara finansial para petani menyebabkan dalam proses bertani terkadang para petani kurang begitu memperhatikan kualitas

tanaman yang dihasilkan. Maka dari itu peran pemerintah amatlah dibutuhkan dalam rangka memberikan bantuan agar petani-petani bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang berkualitas serta memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Dengan cara memberikan subsidi pupuk kepada setiap petani, Dengan demikian upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani akan bisa terlaksana.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan subsidi pupuk terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.11: Jawaban Responden Mengenai Subsidi Pupuk

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	18	21,7 %
2	Cukup baik	25	20,1 %
3	Kurang baik	9	10,9 %
4	Tidak baik	31	37,3 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyediaan subsidi pupuk terhadap petani telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah, dimana yang menjawab baik sebanyak 18 orang atau 21,7 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 25 orang yaitu 20,1 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 9 orang atau 10,9 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 31 orang atau 37,3 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa subsidi pupuk belum berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 37,3 %.

Subsidi pupuk yang didapatkan di Desa Teluk Lecah ada dua bentuk, yang pertama berbentuk barang, dan kedua berbentuk pengurangan harga dari harga aslinya. Pada tahun 2010 ada dua jenis pupuk yang disubsidikan yaitu pupuk akar dan buah untuk petani sawah, yang mana masyarakat hanya membayar seperempat dari harga aslinya. Dan masyarakat yang mengambil pupuk ini dibatasi jumlah banyaknya pupuk yaitu 1 KK hanya boleh membeli 50 Kg. 1 Kg pupuk akar adalah Rp 6000 yang disubsidikan menjadi 1500. Dan pupuk buah Rp 8000 yang disubsidikan menjadi Rp 2000.

Kemudian pada tahun 2012 subsidi pupuk yang didapatkan dari PEMDA yaitu pupuk urea, pupuk akar dan pupuk buah. Yang mana pada tahun ini masyarakat tidak perlu bayar. Namun tetap juga sama seperti tahun 2010, masyarakat hanya mendapatkan 50 kg perKK

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Teluk Lecah yaitu Bapak Abdul Malik pada tanggal 27 Desember 2012, dari Bapak Abdul Malik penulis mendapatkan jawaban mengapa pemberian subsidi belum begitu baik dijalankan. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Abdul Malik :

“dalam pemberian subsidi pupuk di desa ini memang belum begitu memuaskan karena memang pupuk yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah usaha petani yang ada di desa ini, subsidi yang didapatkan dari pemerintah daerah itu sendiri memang sedikit, apalagi

memang desa ini sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian nya adalah dengan bertani”

Tabel V.12: Rekapitulasi jawaban responden di bidang pertanian

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	Jumlah (%)
1	Pembinaan terhadap petani	15	20	21	27	83(100%)
2	Penyediaan bibit unggul	16	17	23	27	83(100%)
3	Subsidi pupuk	18	25	9	31	83(100%)
Jumlah		49	62	53	85	249(100)
Rata-rata		16,3	20,7	17,7	. 28,3	83(100%)
Persentase Rata-rata		19,7%	24,9 %	21,3 %	34,1%	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dua indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 49 orang, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 62 orang, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 53 orang, dan tidak baik jumlahnya 85 orang.

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa di desa ini adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 16,3 dengan persentase 19,7 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 20,7 dengan persentase 24,9 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 17,7 dengan persentase

21,3 %. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 28,3 dengan persentase 34,1 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada bidang kesehatan Tidak baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 28,3 atau 34,1 % dari jumlah responden. Ini dapat diartikan bahwa dalam pengelolaan di bidang pertanian pemerintahan desa belum mampu berkomunikasi baik dengan pihak kabupaten. Bagaimana agar setiap pemerintahan desa yang ada bisa berjalan dengan baik. Karena kita ketahui pihak kabupatenlah yang memfasilitasi setiap keperluan yang ada di Desa.

5.2.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa Dibidang Keagamaan

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Kedua sumber tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada tiga bagian saja dibidang keagamaan ini dalam usaha pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa yaitu mauludan, tahlilan dan penyantunan terhadap anak yatim.

5.2.3.1 Mauludan

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alquran dan sunnah. Acara mauludan ini diadakan dalam upaya untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan islam di muka bumi ini. Partisipasi masyarakat Desa Teluk Lecah terhadap pelaksanaan kegiatan mauludan ini adalah salah satu bentuk pembangunan pada bidang keagamaan. dengan cara memberikan siraman rohani agar bisa memperbaiki akhlak masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan kegiatan mauludan telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.13: Jawaban Responden Mengenai Peringatan Mauludan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	29	34,9 %
2	Cukup baik	20	24,1 %
3	Kurang baik	15	18 %
4	Tidak baik	19	22,9 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai peringatan mauludan, yang menjawab baik sebanyak 29 orang atau 34,9 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 20 orang yaitu 24,1 %, yang menjawab kurang baik sebanyak 15 orang atau 18 %, sedangkan yang tidak sebanyak 19 orang atau 22,9 %. ini artinya bahwa peringatan mauludan sudah berjalan dengan

baik. Karena responden yang menjawab baik jumlahnya sangat besar yaitu sebanyak 29 orang.

5.2.3.2 Penyelenggaraan Tahlilan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa pada bagian penyelenggaraan kegiatan tahlilan telah dilaksanakan di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.14: Jawaban Responden Mengenai Majelis Tahlilan

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	47	56,6 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	11	13,3 %
4	Tidak baik	10	12,1 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai majlis tahlilan, yang menjawab baik sebanyak 47 orang atau 56,6 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang yaitu 18 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 11 orang atau 13,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 10 orang atau 12,1 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa majlis tahlil di desa teluk lecah sudah berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 56,6 %.

5.2.3.3 Penyelenggaraan Penyantunan Anak Yatim

Untuk melihat jawaban responden tentang sejauh mana pelaksanaan pembangunan agama dalam kerangka otonomi desa yaitu pada bagian penyantunan anak yatim bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.15: Jawaban Responden Mengenai Penyantunan Anak Yatim

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	28	33,7 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	22	26,5 %
4	Tidak baik	18	21,7 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai penyantunan anak yatim, yang menjawab baik sebanyak 28 orang atau 33,7 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang yaitu 18 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 22 orang atau 26,5 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 18 orang atau 21,7%.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyantunan anak yatim di Desa Teluk Lecah sudah berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab baik itu mempunyai persentase sebanyak 33,7 %.

Bentuk dari penyantunan anak yatim di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu adanya bantuan dari Pemerintahan Desa seperti memberikan bantuan sepeda kepada anak-anak yatim pada tahun 2010, pada tahun 2012 anak-anak yatim diberikan perlengkapan sekolah seperti Tas, Baju seragam, dan sepatu. Dan anak-anak yatim diberikan uang lebaran setiap tahunnya diberikan biasanya pada malam 10 terakhir dibulan ramadhan.

Tabel V.16: Rekapitulasi jawaban responden di bidang agama

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	Jumlah (%)
1	Mauludan	29	20	15	19	83(100)
2	Tahlilan	47	15	11	10	83(100)
3	Penyantunan anak yatim	28	15	22	18	83(100)
Jumlah		104	50	48	47	249(100)
Rata-rata		34,7	16,7	16	15,6	83(100)
Persentase Rata-rata		41,8%	20 %	19,3 %	18,9 %	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa lima indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi di bidang agama, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 104, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 50, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 48, dan tidak baik jumlahnya 47.

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan Desa di desa ini adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 34,7 dengan persentase 41,8 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 16,7 dengan persentase 20 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 16 dengan persentase 19,3 %. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 15,6 dengan persentase 18,9 %

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis pada bidang agama sudah baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 34,7 atau 41,8 % dari jumlah responden. Mudahnya pembangunan dibidang ini, dikarenakan masyarakat desa ini mayoritas beragama islam dan masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya agama.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang imam masjid yaitu Bapak Basir di Teluk Lecah Kecamatan Rupert pada tanggal 5 Januari 2013, Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Imam Basir :

“Semua urusan pembangunan dibidang agama sangat mudah dilaksanakan di Desa ini, karena masyarakat desa ini sangat fanatik dengan agama. Kemudian faktor pendorong utama bisa terlaksananya pembangunan di desa ini yaitu desa ini bisa dikatakan secara keseluruhan masyarakat beragama islam. ini tentunya sangat mudah untuk menerapkan pembangunan dibidang agama, karena tidak mungkin terjadi kesalah pahaman antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Seperti halnya dalam perayaan maulud Nabi, tahlilan. Yang mana menurut masyarakat desa ini, perayaan mauludan Nabi dan tahlilan merupakan usaha mereka untuk lebih meningkatkan keimanan mereka dan memberi semangat baru jika mengingat akan perjuangan rasul Allah S.A.W” begitu juga dengan usaha penyantunan anak yatim sudah berjalan sangat baik. Anak yatim pasti akan mendapatkan yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya”.

5.2.4 Pelaksanaan Pembangunan Dibidang Kesehatan

Visi pembangunan kesehatan kedepan adalah “indonesia sehat”. Untuk mewujudkan visi kesehatan tersebut, maka misi pembangunan kesehatan adalah menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungannya. yang menjadi perhatian utama dalam penelitian dibidang ini yaitu tentang penyediaan posyandu dan penyediaan pustu.

5.2.4.1 Penyediaan Posyandu

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi Ibu dan Anak-anak. Semuanya tersebut bisa terwujud apabila adanya penyediaan posyandu yang bermutu mulai dari tenaga kesehatannya sampai dengan sarana-prasarana pendukung kelancaran posyandu.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah penyediaan posyandu yang bermutu baik dari segi tenaga kesehatannya sampai dengan sarana dan prasarana telah tersedia di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.17: Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Posyandu

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	14	16,9 %
2	Cukup baik	13	15,7 %
3	Kurang baik	26	30,3 %
4	Tidak baik	30	36,1 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penyediaan posyandu di Desa Teluk Lecah, yang menjawab baik sebanyak 14 orang atau 16,9 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 13 orang yaitu 15,7 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 26 orang atau 30,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 30 orang atau 36,1 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan posyandu tidak berjalan dengan baik di Desa ini. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 36,1%.

Jumlah posyandu di Desa Teluk Lecah adalah 3 buah. Masing- masing posyandu terdiri atas 7 orang Kader. Masing-masing posyandu menjalankan rutinitas setiap bulanya dengan hari yang berbeda-beda karena tenaga medis cuma ada dua orang. Adapun kerja rutinitas posyandu adalah :

1. Dimeja pertama, melakukan pendaftaran nama anak dan orang tua yang ikut dalam kegiatan posyandu.
2. Di meja kedua, melakukan penimbangan anak-anak Balita
3. Dimeja ketiga, melakukan pencatatan berat timbangan anak.

4. Dimeja keempat, memberikan pelayanan kesehatan(suntik) oleh tenaga medis
5. Penyuluhan

Selain itu, di posyandu Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert juga menyediakan obat gratis untuk ibu hamil, untuk anak-anak BALITA mendapatkan imunisasi DPT, Polio, imunisasi campak, dan hepatitis B. Serta setahun 2 kali BALITA diberikan Vitamin A yaitu pada bulan agustus dan oktober.

5.2.4.2 Penyediaan Pustu (Puskesmas Pembantu)

Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat maka harus ada penyediaan balai pengobatan yang didukung dengan sarana dan prasarana bermutu.

Puskesmas Pembantu di desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert tenaga medisnya terdiri dari dua orang, yaitu pak pandi dan ibu endang. Pada tahun 2010, dalam pelayanan kesehatan masih lagi dibayar. Harganya sesuai dengan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun pada tahun 2012 sampai sekarang pelayanan kesehatan berupa obat-obatan tidak lagi bayar. Masyarakat diberikan obat gratis yang memang sudah disediakan dari PEMDA. Namun kebanyakan masyarakat desa jika ada keluarga yang sakit serius maka akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu di Dumai karena memang fasilitas yang ada di pustu tidak begitu lengkap.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah penyediaan pustu yang bermutu baik dari segi tenaga kesehatannya sampai dengan sarana dan prasarana telah tersedia di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.18: Jawaban Responden Mengenai Penyediaan Pustu

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	18	21,7 %
2	Cukup baik	22	26,5 %
3	Kurang baik	19	22,9 %
4	Tidak baik	24	28,9 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penyediaan posyandu di Desa Teluk Lecah, yang menjawab baik sebanyak 18 orang atau 21,7 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 22 orang yaitu 26,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 19 orang atau 22,9 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 24 orang atau 28,9 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan pustu tidak berjalan dengan baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 28,9 %.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Teluk Lecah yaitu Bapak kepala BPD yakni bapak abdurrahman pada tanggal 1 Januari 2013, dari abdurrahman penulis mendapatkan jawaban mengapa penyediaan pustu didesa teluk lecah belum ada sepenuhnya. Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Nasir :

“memang pada dasarnya penyediaan pustu ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam urusan kesehatan Namun karena

kurangnya sarana dan prasarana dalam puskesmas pembantu ini maka sangat sulit masyarakat ingin berobat. Seperti kurangnya alat-alat dalam pustu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mendadak sakit keras, kurangnya obat-obatan yang tersedia kemudian karena sarana prasarana jalan yang tidak mendukung juga memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di desa ini”

Tabel V.19: Rekapitulasi jawaban responden di bidang kesehatan rakyat

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	Jumlah (%)
1	Penyedian Posyandu	14	13	26	30	83 %
2	Penyedian Pustu	18	22	19	24	83 %
Jumlah		32	35	45	54	166 %
Rata-rata		16	17,5	22,5	27	83 %
Persentase rata		19,3 %	21,1%	27,1 %	32,5 %	100 %

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dua indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan responden yang menyatakan baik sebanyak 32, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 35, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 45, dan tidak baik jumlahnya 54.

Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden kemudian dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 16 dengan persentase 19,3 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 17,5 dengan persentase 21,1 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 22,5 dengan persentase

27,1 %. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 27 dengan persentase 32,5 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada bidang kesehatan Tidak baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 27 atau 32,5 % dari jumlah responden. Ini artinya bahwa pemerintahan desa belum mampu mengatur dengan baik dalam menjamin kesehatan masyarakat.

5.2.5 Pelaksanaan Pembangunan Desa Dibidang Pendidikan.

Adapun tujuan dari pembangunan pendidikan ialah untuk mencerdaskan kehidupan dan mengembangkan pola pikir masyarakat. Program pembangunan pendidikan ini merupakan respons atau tuntutan masyarakat yang berkembang dinamis, yang menghendaki adanya perbaikan dibidang pendidikan. Program pembangunan pendidikan telah disusun, terdiri dari:

1. Program peningkatan pemerataan pendidikan (Dasar, Menengah, dan Tinggi) Peningkatan pemerataan dilakukan melalui:
 - a. Memperluas jangkauan pada jenjang sekolah dasar, menengah dan tinggi sehingga masyarakat mudah mengakses sekolah.
 - b. Meningkatkan daya tampung, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah padat penduduk.
2. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan, Upaya yang dilakukan dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, melalui:

- a. Peningkatan kualitas tenaga guru.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Penyempurnaan kurikulum.
 - d. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.
3. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi warga masyarakat untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Di era yang serba maju seperti sekarang ini hendaknya daerah harus memperhatikan pendidikan masyarakatnya karena makin lama persaingan akan semakin ketat. Pemerintahan desa diberi kewajiban untuk senantiasa memperhatikan dan menjamin bahwa masyarakat memperoleh pendidikan yang baik dan layak serta adil tanpa memandang status masyarakat. Kemajuan dibidang pendidikan akan tergantung pada kualitas tenaga pengajar dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

5.2.5.1 Mendata anak usia sekolah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Lahirnya individu-individu berwawasan luas dan bermutu tergantung pada pendidikan yang telah ditempuh. Maka dari itu pemerintahan desa dengan kewenangan yang dimiliki dari kebijakan otonomi desa haruslah mengusahakan agar masyarakatnya memperoleh pendidikan yang layak.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.20: Jawaban Responden Mengenai Pendataan Anak Usia Sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	11	13,3 %
2	Cukup baik	15	18 %
3	Kurang baik	15	18 %
4	Tidak baik	42	50,7 %
Jumlah		83	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang pendataan anak usia sekolah di Desa Teluk Lecah, yang menjawab baik sebanyak 11 orang atau 13,3 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 15 orang atau 18 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 15 orang atau 18 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 42 orang atau 50,7 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendataan anak usia sekolah di desa ini kurang baik, Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 50,7 %. Itu artinya belum adanya kesadaran dari pemerintahan desa dalam pendataan anak usia sekolah ini sangat penting karena dari situ nantinya pasti akan terjawab apa permasalahan utama mengapa anak ini tidak sekolah. Pendataan ini sangat penting dilakukan, karena anak-anak desa inilah nantinya akan menentukan maju mundurnya desa ini.

Pemerintahan desa di Desa Teluk Lecah hanya sekali melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah, yaitu pada tahun pada tahun 2011. Yang mana dari hasil pendataan yang mereka lakukan masih banyak ditemukan anak yang tidak bersekolah padahal mereka masih berusia wajib sekolah.

Tabel V.21: Hasil Pendataan Anak Usia Sekolah

No	Sekolah	Anak usia sekolah		
		Laki-Laki	Perempuan	Yang tidak Bersekolah
1	TK	31	47	27
2	SD	737	920	24
3	SMP	431	384	11
4	SMA	791	901	18

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

5.2.2.2 Membangun dan memelihara gedung sekolah

Pembangunan sekolah di desa Teluk Lecah sudah cukup memadai untuk Memperoleh pendidikan yang bermutu, tentunya sangat bergantung pada kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, tidak cukup hanya dengan kualitas tenaga pengajar. Adapun sumber pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.22: Sumber Pembangunan Sekolah

No	Sekolah	Sumber Pembangunan
1	TK	PNPM
2	SD	PEMDA
3	SMP	PEMDA
4	SMA	PEMDA

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah menyediakan lembaga-lembaga pendidikan dan memelihara gedung sekolah di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.23 Jawaban responden mengenai pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	9	10,9 %
2	Cukup baik	17	20,5%
3	Kurang baik	36	43,3 %
4	Tidak baik	21	25,5 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab mengenai pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, yang menjawab baik sebanyak 9 orang atau 10,9 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 17 orang atau 20,5 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 36 orang atau 43,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 21 orang atau 25,3 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah Kurang baik. Karena responden yang menjawab Kurang baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 43,3 %.

5.2.5.3 Menjaga keamanan sekolah

Bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kemajuan pada sektor pendidikan adalah dengan cara menjaga keamanan sekolah-sekolah dilingkungan

pemerintahan desa tersebut. Dengan demikian akan terciptanya ketentraman dalam proses belajar-mengajar.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah pemerintah desa telah menjaga kemandirian sekolah di Desa Teluk Lecah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.24 Jawaban Responden mengenai penjagaan keamanan sekolah

No	Jawaban responden	Responden	Persentase (%)
1	Baik	8	9,6 %
2	Cukup baik	13	15,7 %
3	Kurang baik	21	25,3 %
4	Tidak baik	41	49,4 %
Jumlah		83	100 %

Sumber data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab tentang penjagaan keamanan sekolah, yang menjawab baik sebanyak 8 orang atau 9,6 %, yang menjawab cukup baik adalah sebanyak 13 orang yaitu 15,7 %, yang menjawab kurang baik juga sebanyak 21 orang atau 25,3 %, sedangkan yang menjawab tidak baik yaitu sebanyak 41 orang atau 49,4 %.

Dari jawaban diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjagaan keamanan sekolah di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat tidak baik. Karena responden yang menjawab tidak baik itu mempunyai persentase yang sangat besar yaitu dengan persentase 49,4 %. Artinya, perlu adanya kesadaran dari pemerintah desa dan guru-guru di sekolah untuk melakukan penjagaan keamanan sekolah agar tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan masyarakat dan desa.

Untuk mencari kebenaran informasi ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang tokoh masyarakat yaitu Bapak Hasan Ahmad pada tanggal 3 Januari 2013, dari Bapak Hasan Ahmad penulis mendapatkan jawaban mengapa penjagaan keamanan sekolah sekolah tidak dilaksanakan.

Berikut ini kutipan langsung hasil wawancara dari Bapak Nasir :

“ penjagaan sekolah di desa ini memang belum dilaksanakan hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran dari Kepala Sekolah dan guru yang ada disekolah-sekolah yang ada di desa ini tentang pentingnya penjagaan keamanan sekolah, tidak adanya penjagaan keamanan di sekolah-sekolah pada desa sangat memberi pengaruh kepada siswa dan siswi teruma mudahnya pengaruh dari teknolngi yang canggih seperti HP kamera yang kita ketahui anak-anak remaja zaman sekarang, penggunaan HP kamera hanyalah untuk menyimpan film porno. yang seharusnya sekolah bisa memberikan keamanan berupa larangan keras bagi siswa maupun siswi untuk menggunakan HP kamera Ketidakadaan penjagaan keamanan disekolah sekolah juga berdampak kepada seluruh masyarakat desa karena banyak kejadian yang tidak di inginkan terjadi, seperti: sekolah ini dijadikan tempat berpacaran oleh anak-anak muda dimalam hari”

Tabel V.25: Rekapitulasi jawaban responden di bidang pendidikan

No	Sub Indikator	Jawaban Responden				
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	Jumlah (%)
1	Mendata anak usia sekolah	11	15	15	42	83(100%)
2	Membangun dan memelihara gedung sekolah	9	17	36	21	83(100%)
3	Menjaga keamanan sekolah	8	13	21	41	83(100%)
Jumlah		28	45	72	104	249(100%)
Rata-rata		9,3	15	24	34,7	83(100%)
Persentase Rata-rata		11,2%	18,1%	28,9%	31,8%	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator yang diteliti dari sub variabel penelitian mengenai otonomi dibidang kesehatan rakyat, tanggapan

responden yang menyatakan baik sebanyak 28, kemudian yang menyatakan cukup baik jumlahnya 45, yang menyatakan kurang baik jumlahnya 72, dan tidak baik jumlahnya 104.

Kemudian untuk mengetahui tentang pembangunan Desa adalah dengan mengetahui jumlah rata-rata dari masing-masing jawaban responden, dan dari penjumlahan masing-masing tanggapan responden dan dibagi jumlah indikator maka diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata adalah 9,3 persentase 11,2 %, dan responden yang menyatakan Cukup Baik rata-rata adalah 15 dengan persentase 18,1 %, dan responden yang menyatakan kurang baik rata-rata adalah 24 dengan persentase 28,9 %. Kemudian selanjutnya yang menjawab Tidak Baik rata-rata 34,7 dengan persentase 31,8 %

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis pada bidang pendidikan Tidak baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden yang penulis kumpulkan melalui penyebaran angket. Yang menjawab Tidak Baik berada pada persentase yang sangat tinggi yaitu dengan rata-rata 34,7 atau 31,8 % dari jumlah responden. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal membangun pendidikan khususnya pada indikator dalam penelitian ini.

5.3 REKAPITULASI DATA

Dari indikator-indikator variabel pada penelitian ini, maka selanjutnya dapat disimpulkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Tabel V.24: Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

No	Indikator	Jawaban Responden				
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak baik	Jumlah (%)
1	Bidang pasar desa dan kenyamanan masyarakat	38	60	62	89	249(100%)
2	Bidang pertanian	49	62	53	85	249(100%)
3	Bidang keagamaan	104	50	48	47	249(100%)
4	Bidang kesehatan	32	35	45	54	166(100%)
5	Bidang pendidikan	28	45	72	104	249(100%)
Jumlah		251	252	280	379	1166(100)
Rata-rata		50,2	31,5	56	75,8	213,5(100)
Persentase Rata-rata		21,6%	21,7%	24,1%	32,5%	100 %

Sumber Data: *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari hasil rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa analisis pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

- a. Jawaban responden pada jawaban “Baik” sebanyak 251 dari kelima indikator penelitian yang ada atau sebanyak 21,6 %
- b. Jawaban responden pada jawaban “ Cukup Baik” sebanyak 252 dari kelima indikator penelitian yang ada atau sebanyak 21,7 %
- c. Jawaban responden pada jawaban “Kurang Baik” sebanyak 280 dari kelima indikator penelitian yang ada atau sebanyak 24,1%

- d. Jawaban responden pada jawaban “Tidak Baik” sebanyak 379 orang dari kelima indikator penelitian yang ada atau sebanyak 32,5 %

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis hasilnya Tidak Baik. Dari pengamatan peneliti lapangan dan dari beberapa sumber yang peneliti wawancarai bahwa Hal ini disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa. Dengan demikian pembangunan di desa ini tidak bisa berjalan dengan mestinya.

5.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis maka penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam pembangunan di desa ini antara lain :

5.4.1 ANGGARAN DANA DESA

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan tentu memerlukan pembiayaan. Dimana anggaran merupakan faktor yang memiliki peranan cukup penting demi terlaksana suatu pembangunan. Karena tanpa dana maka sangat mustahil pembangunan akan terwujud. Meskipun sudah di susun dengan rencana yang baik, namun bila anggaran tidak ada tentu rencana tersebut tidak akan terealisasi. Salah satu faktor penghambat pembangunan di desa teluk lecah kecamatan rupert kabupaten bengkalis ialah kurangnya pendanaan yang disalurkan dari pemerintah daerah ke Desa ini, sehingga pembangunan yang telah

direncanakan terhambat. Adapun sumber dana yang didapatkan di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dari ADD, PAD, dan bantuan dari pemerintah Daerah dan Provinsi dengan pengajuan proposal.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang (ADD) yang ada tidak dapat mendorong terlaksananya pembangunan Desa dengan baik, ini dikarenakan dana ADD ini juga digunakan untuk keperluan diluar program pembangunan Desa yaitu untuk membayar gaji pegawai aparatur pemerintahan desa dan ADD juga digunakan dalam acara yang ada didesa seperti MTQ se-Desa. sehingga dana yang tersisa tidak begitu banyak dan mengakibatkan program pembangunan yang direncanakan tidak tercapat begitu baik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.25: Sumber Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 2012

No	Dana	Sumber	Jumlah
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	PEMDA(sebagai penyerahan tugas kepada desa)	Rp 300.000.000
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proses Administrasi Desa (pengurusan surat menyurat)	Rp 3.780.000
3	Bantuan pemerintah	Bantuan dari pemerintah Daerah dan provinsi dengan pengajuan proposal	Rp 100.000.000
JUMLAH			Rp 403.780.000

Sumber: Kantor Desa Teluk Lecah tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber dana yang terbesar dalam pelaksanaan pembangunan desa diperoleh dari dana ADD sebesar Rp 400.000.000.- kemudian dana bantuan dari Pemerintahan Kabupaten pada tahun 2012 yaitu sebanyak Rp 100.000.000.- sedangkan dana yang terkecil yaitu dana dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebesar Rp 3.780.000.-

Seperti yang telah dijelaskan diatas Penggunaan ADD bukan hanya pada program kerja yang telah ditetapkan namun juga sebagian digunakan pada keperluan desa lainnya. Sehingga banyak program kerja yang telah dibentuk belum bisa di jalankan dengan baik.

5.4.2 KURANGNYA PARTISIPASI DARI MASYRAKAT

Kurangnya partisipasi masyarakat di Desa ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan, yang mana kita ketahui dengan adanya partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan maka akan mudah desa ini mengatur proses pelaksanaan pembangunan dalam mengembangkan desa nya sesuai dengan kemauan masyarakat.

5.4.3 KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat pembangunan di desa teluk lecah kecamatan rupa, seperti kurangnya sarana dan prasara di Pustu. Yang mana dengan kekurangan sarana dan prasarana disini menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang optimal. apabila masyarakat ada yang sakit, karena kurangnya ketersediaan alat kesehatan membuat diagnosa penyakit tidak bisa diketahui hasilnya. Sehingga masyarakat bila mau berobat harus pergi ke luar daerah. kemudian kalau di bidang pendidikan

masih perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah desa. Misalnya pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan minat dan mutu pelajar misalnya berupa komputer, dan alat-alat olahraga dan alat seni lainnya. Kenyataannya di lapangan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang bisa meningkatkan mutu dalam proses belajar. Jika kondisi seperti ini terus berjalan tentu akan berdampak pada kualitas SDM yang akan dihasilkan.

5.4.4 KETERBATASAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan rencana pembangunan di suatu tempat. Meskipun dana yang ada telah mencukupi namun jika tidak pandai mengelola maka hasilnya tentu tidak akan optimal. Di desa teluk lecah, terbatasnya sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan yang dibutuhkan di desa teluk lecah membuat terhambatnya proses pembangunan desa. Seperti kurangnya SDM yang memahami seluk beluk tentang pertanian, dimana masyarakat desa Teluk lecah ini mata pencahariannya didominasi oleh pertanian. Apabila dalam pengelolaan bidang pertanian dapat secara optimal tentu akan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa.

BAB VI

PENUTUP

Bedasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dari hasil jawaban kuesioner yang disampaikan dan data-data yang diperoleh di lapangan dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis, maka penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat sekaligus menjadi masukan bagi pihak pemerintah desa khususnya dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak berjalan sebagaimana semestinya, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden yang menjawab tidak baik cukup banyak yaitu sebanyak 32,5 % dari keseluruhan indikator yang dijawab oleh responden.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis hasilnya Tidak Baik. Hal ini bisa disebabkan kurang adanya kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan Masyarakat Desa dalam upaya pembangunan desa. Dengan demikian pembangunan di desa ini tidak bisa berjalan secara optimal. Akibat dari pelaksanaan pembangunan ini tidak baik maka otonomi di desa ini semakin lama semakin hilang. Salah satu contoh, pembangunan dibidang

kenyamanan Desa. Karena tidak adanya penjagaan kusus di desa ini, maka anak-anak muda berlaku semena-mena, banyak kemaksiatan yang terjadi. Budaya-budaya dari adat-istiadat mereka sendiri semakin lama semakin hilang.

Untuk mengetahui hasil penelitian secara keseluruhan adalah dengan melihat hasil rekapitulasi keseluruhan dari indikator penelitian. Diketahui bahwa tanggapan responden yang menyatakan Baik dengan rata-rata 50,2 persentase 21,6%, kemudian menyatakan Cukup Baik rata-rata 31,5 dengan persentase 21,7%, dan yang menyatakan Kurang Baik dengan rata-rata adalah 56 dengan persentase 24,1 Dan terakhir yang menyatakan Tidak Baik dengan rata-rata 75,8 dengan persentase sebesar 32,5%. Dengan demikian, berdasarkan penjumlahan dari 5 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan di desa ini Tidak Baik.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis pelaksanaan pembangunan desa di desa teluk lecah kecamatan rupa kabupaten bengkalis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika
2. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan karena dengan keikutsertaan masyarakatlah maka pembangunan akan mudah terlaksanakan.

3. Harus adanya ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat desa.
4. Antara pemerintahan desa dengan warga sebaiknya selalu melakukan kerjasama dalam berbagai bidang demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan desa.
5. Pemerintahan desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lambannya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan desa tidak terus terhambat.
6. Harus ada tindakan yang tegas yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengatur masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita Rahardjo, (2011), *manajemen pemerintahan daerah*, yogjakarta:

Graha Ilmu

Arikunto Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rieneka Cipta

J. Kaloh, *mencari bentuk otonomi daerah*, Jakarta, PT Rineka Cipta

Kencana. Syafi'ie, Inu. *ILMU pemerintahan & AL-QURAN*, Jakarta : PT

Bumi Aksara 2004

....., (2000) *Alquran dan ilmu administrasi*, jakarta: PT

rineka cipta

Kuncoro Mudrajat (2002), *Ekonomika pembangunan*, jakarta: Erlangga

Muslim, 2011, *Mobilitas Sosial Petani Karet Konservasi ke Petani Kelapa*

Sawit di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis,

Jurnal El-Riyasah (Kepemimpinan & Administrasi) Vol. 2. No. 2 101-

212.

Ndraha, Taliziduhu *pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : PT

Bumi Aksara 1991

Nurcholis hanif, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa,*

jakarta: PT gelora aksara pratama 2011.

P. Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

2001

Pasalong, Harbani. *Teori Administrasi*. Bandung: Alfabeta, cv 2008.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2008 pasal 5 tentang
*tentang tugas, wewenang, kewajiban, hak, dan larangan Pemerintahan
Desa*

Sugiyono, *Metodel Administrasi*. Bandung : Alfabetta, 2007.

Umar, Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan
Niaga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2004

Undang-Undang Otonomi Desa 1995 dan Juklak. Jakarta: Redaksi Sinar
Grafika.2002

Widjaja HAW. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta:Rajawali
Pers.2008

..... *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. jakarta:Rajawali
Pers.2005

..... *Otonomi Desa*. Jakarta:Rajawali Pers.2008

..... *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta:
Rajagrafindo Persada 2002

Wibawa, Samudra. *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta:
graha ilmu 2009

Zainul basri yuswar & subri mulyadi. *Keuangan negara dan analisis
kebijakan utang luar negeri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005